

ANCAMAN PEROMPAKAN DI PERAIRAN SELAT MAKASSAR: EVALUASI KEAMANAN MARITIM INDONESIA

THE THREAT OF PIRACY IN THE MAKASSAR STRAIT: EVALUATION OF INDONESIAN MARITIME SECURITY

Muthiah Hafizhah Manorek¹, Agussalim Burhanuddin²

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

hfzhmutia1513@gmail.com, agus.unhas@gmail.com

Abstract

The Makassar Strait is one of Southeast Asia's most strategic shipping lanes, facing growing threats of maritime piracy. Despite its critical role in international trade connectivity, this region has not received proportional attention in maritime security policies or scholarly discourse. This study aims to identify the underlying factors contributing to the Makassar Strait's vulnerability to piracy, evaluate the effectiveness of Indonesia's maritime security strategies, and propose actionable policy recommendations. Utilizing a qualitative case study approach, the research draws on piracy incident data from 2019 to 2024 obtained from Bakamla and the International Maritime Bureau (IMB), alongside a literature review of official policy documents and academic sources. The findings indicate that high vessel traffic, weak naval patrol coverage, limited monitoring technology, poor regional cooperation, and socio-economic challenges in coastal communities are key drivers of maritime insecurity. Existing maritime security efforts—including sea patrols and regional frameworks—have been hindered by resource limitations, fragmented coordination, and low public engagement. The study recommends strengthening institutional capacity, leveraging advanced surveillance technologies, enhancing regional collaboration, and empowering coastal communities as key partners in Indonesia's maritime security system.

Keywords: Makassar Strait, maritime piracy, maritime security, policy evaluation, regional cooperation

Abstrak

Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran strategis di Asia Tenggara yang menghadapi peningkatan risiko perompakan maritim. Meskipun memiliki peran vital dalam konektivitas perdagangan internasional, kawasan ini belum mendapatkan perhatian sepadan dalam kebijakan maupun kajian keamanan laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerentanan Selat Makassar terhadap perompakan, mengevaluasi efektivitas kebijakan keamanan maritim Indonesia, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat keamanan kawasan. Metode yang digunakan adalah studi kasus berbasis data insiden perompakan dari tahun 2019 hingga 2024 yang diperoleh dari Bakamla dan International Maritime Bureau (IMB), serta studi pustaka terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya intensitas kapal dagang, lemahnya patroli laut, terbatasnya teknologi pemantauan, minimnya kerja sama regional, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir menjadi faktor dominan kerentanan wilayah. Kebijakan keamanan yang telah diterapkan, seperti patroli laut dan kerja sama regional, belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas lembaga, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, adopsi teknologi pemantauan yang lebih canggih, peningkatan kerja sama antarnegara kawasan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra dalam sistem keamanan maritim nasional.

Kata kunci: Selat Makassar, perompakan laut, keamanan maritim, kebijakan maritim, kerja sama regional

1. PENDAHULUAN

Keamanan maritim merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan regional, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai negara dengan posisi geostrategis yang dilalui oleh berbagai jalur pelayaran internasional, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga wilayah perairannya dari berbagai bentuk kejahatan maritim, termasuk perompakan. Selat Makassar sendiri merupakan salah satu jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Namun, tingginya aktivitas kapal dagang di Kawasan ini menjadikan Selat Makassar rentan terhadap ancaman perompakan maritim. Berbeda dengan Selat Malaka dan Laut Sulu yang telah menjadi fokus kajian keamanan maritim, Selat Makassar masih kurang mendapat perhatian dari para peneliti dan otoritas keamanan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas perompakan di Kawasan tersebut (Prihadi et al., 2022).

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, menjadikan sektor maritim sebagai pilar utama kedaulatan, ekonomi, dan pertahanan nasional. Selat Makassar memegang peranan vital yang tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi perdagangan maritim global. Selat ini merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Hindia di selatan dengan Samudra Pasifik di utara. Sebagai *choke point* internasional yang dilintasi oleh kapal-kapal dagang raksasa, tanker, hingga kapal penumpang, kelancaran dan keamanan Selat Makassar sangat menentukan stabilitas rantai pasokan global dan pergerakan ekonomi nasional, khususnya dalam menghubungkan kawasan Indonesia bagian barat dan timur.

Indonesia telah menetapkan kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif untuk menjaga keamanan laut, melibatkan berbagai instansi seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), dan Kementerian Perhubungan. Namun, tingginya angka insiden perompakan di perairan rawan, termasuk potensi ancaman di Selat Makassar, mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) antara kapasitas pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan efektivitas patroli lapangan.

Meskipun memiliki nilai strategis yang tinggi, perairan Indonesia, termasuk Selat Makassar, tidak luput dari ancaman keamanan maritim non-tradisional. Di antara berbagai bentuk kejahatan di laut (seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan terorisme maritim), perompakan (piracy) dan perampokan bersenjata di laut (armed robbery against ships) tetap menjadi ancaman faktual yang signifikan. Laporan-laporan dari lembaga regional dan internasional, seperti ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia), sering mencatat adanya insiden perompakan di perairan Indonesia. Khusus di Selat Makassar, ancaman ini diperparah oleh lokasi geografisnya yang berdekatan dengan daerah rawan kejahatan lintas batas, serta adanya celah pengawasan maritim yang perlu dioptimalkan. Insiden perompakan tidak hanya mengakibatkan kerugian material bagi perusahaan pelayaran, tetapi juga mengancam keselamatan awak kapal, menaikkan biaya asuransi (war risk premium), dan merusak citra keamanan maritim Indonesia di mata dunia internasional.

Salah satu faktor utama yang membuat selat makassar rawan terhadap perompakan adalah minimnya patroli keamanan dari negara-negara sekitar. Patroli keamanan yang tidak memadai membuka peluang bagi kelompok perompak untuk melakukan serangan terhadap kapal dagang

yanga melintasi jalur tersebut. selain itu, luasnya wilayah perairan selat makassar menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya keamanan laut juga menjadi kendala bagi negara-negara yang berbatasan dengan selat makassar dalam menjaga stabilitas keamanan perairan.

Tingginya aktivitas kapal dagangan di selat makassar meningkatkan potensi perompakan. Kapal-kapal dagang yang melintasi Kawasan ini sering menjadi target bagi kelompok perompak yang mencari keuntungan cepat dengan mengambil alih muatan bernilai tinggi, seperti minyak, logistic, dan barang elektronik. Situasi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan sistem pemantauan dan respon cepat dari otoritas keamanan (Al Syahrin, 2018). Kapal yang melintasi Kawasan ini seringkali harus mengandalkan sistem keamanan internal yang minim.

Dalam upaya mengatasi ancaman perompakan, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan patroli laut dan mengembangkan teknologi pemantauan, seperti penggunaan radar dan sistem pengawasan kapal. Namun efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi menjadi tantangan utama dalam penerapan kebijakan keamanan maritim yang lebih efektif. Koordinasi antarnegara di Kawasan Asia Tenggara dalam menangani ancaman perompakan di Kawasan ini juga masih belum optimal. Negara-negara yang berbatasan dengan selat makassar, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga kerja sama keamanan belum efektif. Hal ini membuat Kawasan Selat Makassar tetap menjadi area yang rawan terhadap aksi perompakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk memahami faktor-faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perompakan di selat makassar. Faktor-faktor ini mencakup kondisi geografis, tingginya aktivitas kapal dagang, serta kelemahan sistem keamanan dan pengawasan maritim. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini kemudian akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi perompakan di kawasan tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman perompakan di selat makassar. Evaluasi ini akan mencakup analisis terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah, termasuk peningkatan patrol, penggunaan teknologi pemantauan, dan kerja sama regional. Dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kelemahan dan kelebihan dari pendekatan yang telah diterapkan.

Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat keamanan di perairan selat makassar dan mengurangi resiko perompakan. Rekomendasi ini akan didasarkan pada analisis faktor resiko dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan keamanan maritim guna menciptakan lingkungan pelayaran yang lebih aman dan kondusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam pembuatan jurnal ini, penulis menggunakan teori keamanan maritim, teori realisme dalam Hubungan Internasional, dan teori keamanan regional.

a. Teori Keamanan Maritim (Maritime Security Theory)

Teori Keamanan Maritim (Maritime Security Theory) menjelaskan bahwa laut bukan hanya jalur perdagangan penting, tetapi juga menjadi arena yang rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, termasuk perompakan, illegal fishing, penyelundupan, dan kejahatan maritim lainnya. Laut merupakan ruang yang luas dan terbuka, sehingga sulit diawasi secara menyeluruh, terutama di kawasan dengan lalu lintas perdagangan yang tinggi seperti Selat Makassar. Berdasarkan teori ini, keamanan maritim mencakup upaya untuk melindungi kapal, pelabuhan, dan jalur perdagangan dari berbagai ancaman yang dapat merugikan perekonomian dan stabilitas nasional. Dalam konteks Selat Makassar, teori ini membantu memahami mengapa kawasan tersebut menjadi target perompakan. Tingginya aktivitas kapal dagang, kurangnya patroli keamanan, serta luasnya wilayah perairan yang sulit diawasi menjadikan Selat Makassar sebagai kawasan rawan perompakan. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini akan menganalisis karakteristik ancaman di Selat Makassar dan menilai efektivitas langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan (Kodir et al., 2022).

b. Teori Realisme dalam Hubungan Internasional

Teori Realisme dalam Hubungan Internasional menekankan bahwa negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional yang selalu bertindak untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanannya. Dalam perspektif realisme, keamanan maritim menjadi salah satu prioritas bagi negara-negara maritim, termasuk Indonesia, karena terkait dengan kepentingan ekonomi, kedaulatan, dan stabilitas nasional. Berdasarkan teori ini, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keamanan di Selat Makassar sebagai salah satu jalur perdagangan penting di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah, seperti meningkatkan patroli laut, memperkuat pengawasan, dan menerapkan kebijakan keamanan maritim untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Teori ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia memprioritaskan keamanan Selat Makassar dan bagaimana negara bertindak dalam menghadapi ancaman perompakan. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kebijakan keamanan maritim Indonesia mencerminkan kepentingan nasional sesuai dengan pendekatan realisme (Rustam, 2016).

c. Teori Keamanan Regional (*Regional Security Complex Theory*)

Teori Keamanan Regional (*Regional Security Complex Theory*) menekankan bahwa keamanan suatu negara dipengaruhi oleh dinamika keamanan di kawasan sekitarnya. Dalam konteks Selat Makassar, keamanan maritim Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh situasi keamanan di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina. Ancaman perompakan di perairan ini sering kali bersifat lintas batas, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama regional. Teori ini menjelaskan bahwa negara-negara yang berada dalam satu kawasan memiliki ketergantungan keamanan, yang berarti ancaman di satu negara dapat mempengaruhi keamanan negara lain. Berdasarkan teori ini, penelitian ini akan mengevaluasi pentingnya kerja sama regional antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi ancaman perompakan di Selat Makassar. Melalui analisis ini, penelitian ini akan menilai efektivitas koordinasi dan kerja sama keamanan maritim antarnegara kawasan dalam menjaga stabilitas dan keamanan perairan (Rustam, 2016).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang berfokus pada analisis kondisi keamanan maritim di Selat Makassar. Sumber data diperoleh dari Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Indonesia dan International Maritime Bureau (IMB), yang secara rutin mencatat dan melaporkan insiden perompakan di perairan internasional. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren perompakan, pola serangan, serta area yang paling rawan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi strategi keamanan maritim yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman perompakan di Selat Makassar.

Selain studi kasus, penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka untuk mendukung analisis. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi pemerintah terkait kebijakan keamanan maritim, seperti peraturan perundang-undangan, instruksi presiden, dan kebijakan operasional dari Bakamla. Penelitian ini juga memanfaatkan literatur dari jurnal akademik, buku, serta laporan dari organisasi internasional. Studi pustaka ini bertujuan untuk memahami kerangka kebijakan keamanan maritim yang telah ada, mengevaluasi efektivitasnya, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan studi pustaka secara bersamaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai keamanan maritim di Selat Makassar dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Kerentanan Selat Makassar terhadap Perompakan

Selat Makassar merupakan salah satu jalur laut yang sangat strategis di Indonesia, menghubungkan Laut Sulawesi dengan Laut Jawa dan menjadi bagian integral dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II). Selat ini menjadi rute utama kapal dagang internasional yang melintas dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Meski demikian, perhatian terhadap keamanan maritim di wilayah ini masih sangat terbatas dibandingkan wilayah lain seperti Selat Malaka atau Laut Sulu.

Kerentanan Selat Makassar terhadap ancaman perompakan laut dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama. Pertama, rendahnya intensitas patroli keamanan di kawasan ini membuka peluang besar bagi aktivitas ilegal, termasuk perompakan. Berdasarkan analisis oleh Rizkiana (2022), belum terdapat keberadaan permanen unsur TNI AL maupun Bakamla di titik-titik kritis Selat Makassar, khususnya di sekitar pesisir Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Patroli yang dilakukan sejauh ini bersifat insidental dan belum mencakup seluruh wilayah rawan.

Kedua, tingginya intensitas lalu lintas kapal niaga di Selat Makassar menjadikan wilayah ini sangat menarik bagi kelompok perompak. Sebagai jalur pelayaran utama, Selat Makassar dilintasi berbagai jenis kapal bertonase besar yang membawa komoditas bernilai tinggi. Hal ini meningkatkan daya tarik wilayah tersebut sebagai target operasi kelompok kriminal maritim (Manessa & Kurniawan, 2024).

Ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir turut menjadi faktor yang memperbesar kerentanan. Komunitas nelayan di sekitar Selat Makassar kerap menghadapi keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan teknologi, yang dalam beberapa kasus dimanfaatkan oleh aktor-aktor perompakan untuk merekrut anggota baru. Hadinata et al. (2023) mencatat bahwa tekanan ekonomi dan lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal berkontribusi terhadap meningkatnya kejahatan maritim skala kecil. Padahal, masyarakat pesisir dapat menjadi mitra penting dalam memberikan informasi mengenai aktivitas mencurigakan di perairan Selat Makassar. Namun, kurangnya program edukasi dan pemberdayaan masyarakat membuat potensi

ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Masyarakat pesisir seringkali justru terlibat dalam aktivitas perompakan sebagai informan atau anggota kelompok perompak.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui kerangka Teori Keamanan Maritim, yang menekankan pentingnya pengelolaan wilayah laut secara holistik, mencakup dimensi militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, menurut perspektif Realisme dalam Hubungan Internasional, negara memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya, termasuk di ruang laut. Namun, dalam konteks Selat Makassar, respons negara terhadap potensi ancaman masih belum proporsional dengan tingkat risikonya.

4.2 Evaluasi Efektivitas Kebijakan Keamanan Maritim Indonesia di Selat Makassar

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keamanan wilayah lautnya, termasuk Selat Makassar yang merupakan salah satu jalur pelayaran utama dalam sistem Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II). Selat ini tidak hanya penting bagi perdagangan domestik, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam konektivitas global dan stabilitas keamanan maritim Asia Tenggara.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan guna menanggulangi ancaman perompakan di kawasan ini. Salah satu instrumen utama adalah peningkatan patroli laut oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta Kepolisian Perairan. Patroli ini bertujuan menciptakan rasa aman bagi kapal niaga yang melintasi Selat Makassar. Namun demikian, efektivitas dari patroli ini masih terbatas. Rustam (2016) mencatat bahwa jumlah armada dan personel yang tersedia masih belum memadai untuk menjangkau seluruh titik rawan di perairan yang sangat luas. Hal ini menyebabkan ruang gerak yang cukup longgar bagi kelompok-kelompok kriminal laut.

Di samping itu, pemerintah juga telah mengadopsi sistem teknologi pemantauan seperti radar dan *Vessel Traffic System* (VTS) yang berfungsi untuk mendeteksi dan memonitor pergerakan kapal di kawasan perairan strategis. Namun, cakupan sistem ini masih sangat terbatas dan hanya terfokus pada wilayah pelabuhan utama atau titik padat lalu lintas. Akibatnya, banyak area di Selat Makassar yang tetap rentan dan tidak terpantau secara menyeluruh oleh sistem pengawasan ini, yang membuka celah bagi aktivitas ilegal yang sulit terdeteksi.

Secara kelembagaan, masih terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang berperan dalam keamanan laut. Supriyanto (2016) menyebutkan bahwa koordinasi antar aktor seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI AL seringkali tidak berjalan efektif, sehingga penanganan insiden di lapangan menjadi lamban dan tidak terintegrasi secara optimal. Hal ini menurunkan efektivitas kebijakan pengamanan yang sudah dirumuskan secara normatif. Keterbatasan infrastruktur pengawasan, juga menjadi kendala nyata dalam penegakan keamanan laut. Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem pelacakan kapal berbasis *Automatic Identification System* (AIS), namun pemanfaatannya di wilayah timur Indonesia, termasuk Selat Makassar, belum maksimal. Menurut Soleh (2024), penggunaan teknologi pengawasan yang tidak merata telah menyebabkan ketimpangan dalam distribusi keamanan maritim antara kawasan barat dan timur Indonesia.

Pemerintah juga telah berupaya meningkatkan kolaborasi regional, seperti melalui partisipasi dalam ASEAN Maritime Forum dan forum-forum bilateral dengan negara-negara tetangga.

Inisiatif ini memiliki potensi besar dalam membangun mekanisme keamanan kolektif yang dapat memperkuat kapasitas respons terhadap ancaman lintas batas. Namun, perbedaan kepentingan nasional, kapasitas militer, dan pendekatan kebijakan antarnegara ASEAN masih menjadi hambatan dalam tercapainya strategi regional yang benar-benar terkoordinasi dan efektif (Buzan & Wæver, 2003).

Selain pendekatan institusional dan teknologi, pemerintah juga telah meluncurkan program edukasi dan pelatihan kepada awak kapal, guna meningkatkan kesadaran dan ketahanan terhadap potensi serangan perompakan. Meskipun program ini merupakan langkah proaktif yang penting, pelaksanaannya belum menjangkau seluruh pelaku pelayaran di Selat Makassar. Banyak kapal niaga yang masih belum dilengkapi dengan standar operasional keamanan maritim yang memadai. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi pelatihan dan belum meratanya pemahaman tentang protokol keamanan di kalangan pengguna laut.

Di tingkat regional, belum adanya mekanisme kerja sama pengamanan maritim yang terkoordinasi secara permanen untuk kawasan Selat Makassar juga menjadi hambatan tersendiri. Berbeda dengan kawasan Laut Sulu yang telah dilindungi oleh Trilateral Maritime Patrols (TMP) antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, kawasan Selat Makassar belum mendapatkan perhatian serupa. Padahal, jika mengacu pada Teori Keamanan Regional (*Regional Security Complex Theory*), keamanan kawasan hanya dapat dicapai secara efektif melalui sinergi antarnegara yang saling berbatasan dan berbagi jalur laut strategis (Buzan & Wæver, 2003). Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan maritim juga menjadi tantangan yang signifikan. Proses penanganan kasus perompakan seringkali terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum di dalam negeri, serta perbedaan sistem hukum dengan negara lain ketika kasus melibatkan aktor lintas batas. Akibatnya, banyak kasus yang tidak berhasil ditangani hingga ke proses peradilan, yang pada akhirnya menurunkan efek jera terhadap pelaku dan memengaruhi persepsi terhadap efektivitas sistem hukum Indonesia dalam konteks maritim.

Padahal jika melihat dari perspektif Realisme, penguatan pertahanan laut di Selat Makassar juga menjadi bagian dari strategi menjaga kepentingan nasional, terutama mengingat letak geografis selat ini yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, prioritas kebijakan pertahanan laut masih terpusat di kawasan barat Indonesia. Ketimpangan ini mencerminkan belum optimalnya penyelarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan strategis kawasan timur, khususnya dalam konteks geopolitik yang terus berkembang (Widodo, 2024).

Selanjutnya, kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem deteksi dan pengawasan dini juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, masyarakat lokal memiliki posisi strategis sebagai mitra keamanan yang dapat memberikan informasi awal mengenai pergerakan mencurigakan atau aktivitas ilegal di perairan sekitar. Kurangnya program edukasi, pendampingan, dan insentif ekonomi menyebabkan partisipasi masyarakat dalam keamanan maritim masih sangat minim dan bersifat pasif.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan keamanan maritim Indonesia di Selat Makassar sejauh ini belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas ancaman perompakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap efektivitas kelembagaan, infrastruktur pengawasan, serta kerja sama lintas negara perlu

dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin keamanan maritim nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa Selat Makassar merupakan wilayah strategis yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perompakan laut, namun belum mendapatkan perhatian yang sebanding dalam kebijakan dan literatur keamanan maritim. Kerentanan tersebut bersumber dari kombinasi faktor geografis, tingginya intensitas lalu lintas kapal niaga, rendahnya frekuensi patroli, keterbatasan pengawasan teknologi, serta minimnya keterlibatan komunitas pesisir dalam sistem keamanan.

Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk peningkatan patroli oleh Bakamla dan TNI AL, penggunaan sistem pemantauan seperti VTS, serta inisiatif kerja sama regional dan pelatihan awak kapal. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, belum meratanya distribusi pengawasan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keamanan maritim yang efektif di kawasan ini.

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan keamanan di Selat Makassar memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sistem patroli dan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih, seperti radar dan satelit. Selain itu, kerja sama regional dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina, harus ditingkatkan untuk mengatasi ancaman perompakan yang bersifat lintas batas. Partisipasi masyarakat pesisir juga perlu ditingkatkan melalui program edukasi dan insentif, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan perairan.

Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan dan mengevaluasi kebijakan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan maritim di Selat Makassar. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan pelayaran yang lebih aman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan poros maritim Jokowi dan sinergitas strategi ekonomi dan keamanan laut Indonesia. *Indonesian Perspective*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Al-Ghifari, M. D., & Wiswayana, W. M. (2025). Analisis strategi pertahanan Indonesia dalam mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia II: Studi kasus Selat Makassar 2019–2024. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(3), 2654–2660.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.
- Hadinata, T., Sutanto, R., & Julian, J. (2023). Utilization of AIS satellite data as behavior information towards interruption violations in the Makassar Strait. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(1). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/928>

- Kodir, A., Sudarya, A., & Ali, Y. (2022). Penanggulangan ancaman di perairan Sulawesi dalam rangka mendukung pertahanan laut Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3261–3271.
- Manessa, M. D. M., & Kurniawan, R. (2024). Marine crime in Indonesia: A spatio-temporal assessment of emerging trends and hotspots. *International Journal of Regional Security Studies*.
<https://ejournal.brin.go.id/ijreses/article/view/7089>
- Prihadi, F., Djujandi, Y., & Herdiansah, A. G. (2022). Interoperabilitas dalam pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) oleh TNI AU dalam menangani pembajakan dan perompakan bersenjata (kajian keamanan di Selat Malaka). *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(2), 135–149.
<https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39589>
- Rizkiana, I. W. (2022). Building maritime security in the Makassar Strait as a choke point on the side of the Nusantara's capital city. *Strategi dan Kampanye Militer*. <https://www.researchgate.net/publication/362775337>
- Rustam, I. (2016). Tantangan ALKI dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. *Indonesian Perspective*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10426>
- Soleh, M. (2024). *The Analysis Of Maritime Pacification Strategies In Security And Defense Aspects*. IOSR Journal.
<https://www.wisnuwardhana.ac.id/..>
- Supriyanto, R. A. (2016). Naval counter-piracy in Indonesia. In P. Lehr (Ed.), *Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism* (pp. 165–180). Routledge.
- Widodo, P. (2024). The strategy of the Indonesian Maritime Security Agency in conducting maritime security patrols. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 4(1), 92–104.
<http://ijhess.com/index.php/ijhess/article/view/1229>